

Model Komunikasi Pemerintahan Kota Tanjung Pinang Dalam Pengembangan Destinasi Wisata

Muhammad Nursyawal

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali haji

Muhammad Ryandana

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali haji

Korespondensi penulis: Alzikri1267@gmail.com

Abstract. *The Tanjung Pinang Island area has many tourist destinations that have special characteristics in Indonesia, but in its management it still faces many obstacles such as a lack of community involvement in managing existing tourism resources and the low quality of tourism facilities and infrastructure. In particular, the development of the area on Penyengat Island as a leading tourist area is also hampered by various regulations, government communication between governments has not been optimal even though the Penyengat Island tourist attraction has been designated as a national cultural heritage. The maintenance of tourist objects is carried out by the Archaeological Center whose technical unit is in Batu Sangkar, West Sumatra. The impact is that regional government communication, especially in terms of budget allocations for the city government, can't be carried out well. This research aims to (1) identify government communication models in managing potential tourist attractions on Penyengat Island, (2) examine the characteristics of the community so that the form and level of community participation in maintaining and preserving the environment in supporting tourism on Penyengat Island can be seen. This research was carried out in Penyengat Island, Tanjungpinang City, Riau Islands Province.*

Keywords: *Communication, Development, Penyengat Island*

Abstrak. Kawasan Pulau Tanjung Pinang merupakan banyak tempat destinasi wisata yang memiliki karakteristik khusus di Indonesia, namun dalam pengelolaannya masih menghadapi banyak kendala seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata yang ada dan rendahnya kualitas sarana dan prasarana Pariwisata. Terkhususnya pengembangan kawasan di Pulau Penyengat sebagai kawasan wisata unggulan juga terbentur pada berbagai regulasi, komunikasi pemerintahan antar pemerintahan dengan belum maksimal meskipun objek wisata pulau penyengat sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Pemeliharaan objek wisata dilakukan oleh Balai Arkeologi yang unit teknisnya berada di Batu Sangkar Sumatera Barat, dampaknya komunikasi pemerintahan daerah terutama dalam hal alokasi anggaran Pemerintah kota penyengat tidak dapat dilakukan baik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi model komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan potensi objek wisata di Pulau Penyengat, (2) mengkaji karakteristik masyarakat sehingga terlihat bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dalam mendukung Wisata di Pulau Penyengat, Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Kunci : Komunikasi, Pengembangan, Pulau Penyengat

PENDAHULUAN

Pengembangan destinasi pariwisata masih hadapi beberapa hambatan serta hambatan, baik dari komunikasi pemerintah maupun manajemen produk wisata yang dibesarkan. Di sisi lain, pertumbuhan pariwisata dunia serta trend pasar terus menjadi menuntut pengelolaan destinasi pariwisata buat sanggup membagikan energi tarik maksimal, pelayanan yang prima serta bermutu dan bermacam kemudahan dari segi akses data, transportasi, aksesibilitas ataupun kemudahan serta kenyamanan melancong yang lain di Indonesia.

Dinamika pertumbuhan pariwisata nasional sangat nampak dari implikasi zona ekonomi serta sosial dan kesejahteraan warga. Aktivitas pariwisata hendak berdampak munculnya kebutuhan hendak benda serta jasa yang berikutnya hendak memicu perkembangan penciptaan dalam negeri. Kemajuan pertumbuhan objek wisata mempunyai keterkaitan lintas zona ekonomi, sosial serta budaya yang sanggup membuka kesempatan investasi yang sangat luas misalnya industri perhotelan serta industri kreatif yang lain ataupun jasa.

Kawasan Pulau Penyengat mempunyai ciri tertentu semacam lokasinya yang terpisah, adat istiadat masyarakatnya yang masih dipegang teguh, peninggalan pusaka(heritage) yang sudah berumur ratusan tahun serta cerita- cerita warga dan aset yang lain yang mendesak keingintahuan orang terhadap Pulau Penyengat. Terus menjadi meningkatnya jumlah kunjungan turis menunjukkan kalau kawasan Pulau Penyengat mempunyai ciri yang menarik serta jadi atensi banyak orang. Hendak namun energi pikat turis tersebut tampaknya belum didukung oleh ketersediaan data serta akomodasi sehingga kawasan wisata Pulau Penyengat belum tumbuh sebagaimana kawasan wisata unggulan di Jawa, Bali, Nusatenggara serta Papua.

Sedangkan itu, Komunikasi pemerintahan memiliki akibat baik terhadap jenis, sasaran, tugas pemerintah tercantum didalamnya pemeliharaan ikatan antar lembaga yang berkaitan dengan pariwisata, tanpa terdapatnya fasilitas serta prasarana buat ikatan komunikasi pemerintahan ke seluruh arah dalam sesuatu aktivitas hendak susah dikenal apa yang telah dicapai tujuan, serta gimana hambatan dalam penerapan pekerjaan, sehingga susah untuk organisasi buat mengevaluasi pekerjaan. Sebab komunikasi pemerintahan merupakan sumber data untuk pimpinan ataupun eksekutif dalam membuat bermacam kebijakan.

Bersumber pada pemaparan itu, jelas kalau upaya komunikasi pemerintahan Tanjung Pinang Kepulauan Riau dalam pengembangan kawasan wisata Pulau Penyengat masih belum maksimal, aspek-aspek sebagaimana uraian di atas secara empirik masih belum terpenuhi. Tidak hanya itu, pengembangan kawasan wisata Pulau Penyengat belum memegang pada aspek man made sebagaimana dijabarkan dalam portofolio produk dalam kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Indonesia 2016- 2019.

Buat mengantarkan pesan kepada warga tidak lah gampang, pesan yang di informasikan tidak hendak senantiasa efisien terkadang terdapat pula terjalin miss komunikasi, oleh sebab itu suatu pesan bisa dikemas dengan baik memakai model- model komunikasi. Model komunikasi bagi Sereno serta Mortensen ialah deskripsi sempurna menimpa apa yang diperlukan buat terbentuknya komunikasi, model komunikasi merepresentasikan secara abstrak identitas berarti dalam melenyapkan rincian komunikasi yang tidak butuh dalam dunia nyata. Model komunikasi bisa menolong kita dalam menarangkan teori serta menganjurkan

cara- cara buat membetulkan konsep- konsep sehingga pesan yang hendak kita sampaikan nantinya dapat efisien(Mulyana, 2007: 132).

Sedangkan itu ditinjau dari aspek prioritas pintu kehadiran utama turis mancanegara, Pulau Penyengat masuk dalam great Batam dengan total turis mancanegara menggapai 1. 885. 012 orang(22%) di dasar great Bali serta great Jakarta. Maksudnya kalau, Great Batam terkategori selaku pintu masuk kehadiran wisman yang lumayan potensial. Tetapi demikian kawasan Tanjungpinang spesial Pulau Penyengat tampaknya tidak masuk dalam 50 Destinasi Pariwisata Nasional ataupun 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Sejatinya energi dukung area(nature) Pulau Penyengat lumayan baik buat dibesarkan jadi kawasan wisata berbasis area baik darat ataupun lautnya, hendak namun aspek ini belum dieksplorasi lebih lanjut oleh Pemerintah ataupun pegiat pariwisata di Tanjungpinang.

Hingga bersumber pada penjelasan tersebut di atas, riset ini dicoba dengan alasan-alasan objektif; kalau kawasan Pulau Penyengat ialah destinasi wisata yang mempunyai ciri, tetapi dalam pengelolaannya masih mengalami banyak hambatan semacam minimnya keterlibatan warga dalam pengelolaan sumber energi pariwisata yang terdapat serta rendahnya mutu fasilitas serta prasarana Pariwisata di Pulau Penyengat. Serta pengembangan kawasan wisata Pulau Penyengat terdapat perkara status otonomi, kalau Pulau Penyengat dikala ini berstatus selaku daerah administratif Kelurahan sehingga inisiatif warga Pulau Penyengat kerap kali terbentur dengan kewenangan pengelolaan daerah oleh Lurah.

Oleh karena itu riset ini riset dibuat untuk melihat partisipasi komunikasi pemerintah dalam meningkatkan wisata pulau penyengat Propinsi Kepulauan Riau. Dengan tujuan mengenali model partisipasi komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan kemampuan objek wisata di Pulau Penyengat, dan mengkaji ciri warga sehingga nampak wujud serta tingkatan partisipasi warga dalam pemeliharaan serta pelestarian area hidup dalam menunjang Desa Wisata di Pulau Penyengat.

KERANGKA TEORI

Model Komunikasi Pemerintahan

Secara universal komunikasi adalah proses interaksi serta simbolik sosial yang digunakan orang buat menyusun nilai-nilai yang membentuk citra menimpa suatu hal bersumber pada itu berperan serta buat membentuk citra lewat simbol-simbol. Penafsiran komunikasi pemerintahan merupakan penyampaian ilham, program, serta program pemerintah kepada warga dalam rangka menggapai tujuan bernegara serta berbangsa. Sedangkan itu, penafsiran model komunikasi pemerintahan ialah deskripsi sempurna menimpa apa yang diperlukan buat

terbentuknya komunikasi di lembaga ataupun pemerintah. Model komunikasi pemerintahan mempresentasikan secara abstrak berartinya komunikasi yang efisien dalam dunia nyata.

Disisi lain aparatur pemerintah mengerti dengan komunikasi tetapi tidak seluruhnya aparat menguasai gimana berbicara secara efisien, khususnya dalam rangka penerapan program pemerintah, terkhusus buat melaksanakan fungsi- fungsi utama yang mencakup pelayanan, pemberdayaan warga dalam pengembangan wisata buat menggapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pihak lain secara illegal.

Bersumber pada tugas serta letaknya dalam struktur pemerintah lebih cenderung bertabiat memberitahu(telling) bukan mencermati(listening) data, kebalikannya bawahan mengantarkan data kepada atasan tentang apa yang mereka inginkan buat didengar oleh pimpinannya, jadi perbandingan status antara pengirim(sender) serta penerima(receiver) bisa jadi hambatan(nose) dalam proses komunikasi yang efisien.

Komunikasi pemerintah memiliki akibat ataupun pengaruh terhadap wujud, sasaran(goal), tugas komunikasi pemerintah tercantum pemeliharaan kedekatan baik, tanpa ataupun terdapatnya fasilitas serta prasarana buat ikatan komunikasi dalam seluruh arah. aktivitas komunikasi pemerintah hendak susah dikenal apa yang telah dicapai, apa yang hendak pemerintah raih serta gimana hambatan, sehingga susah untuk organisasi buat mengevaluasi pekerjaan khususnya bidang pariwisata pulau penyengat Kepulauan Riau.

Komunikasi pemerintahan ialah sumber data untuk pimpinan dalam membuat bermacam kebijakan. bila data yang diperoleh tidak lengkap hendak menyebabkan pengambilan keputusan tidak efisien. Komunikasi antar pimpinan serta bawahan bukan saja selaku perlengkapan buat mengantarkan data namun pula fasilitas memadukan kegiatan kerjasama antar bidang.

Disisi lain, berbicara itu kelihatannya gampang serta simpel, namun sesungguhnya tidak terlepas dari bermacam hambatan ataupun hambatan dalam penerapannya ataupun praktek komunikasi. Berarti untuk pemerintah mengenali ataupun menyadari adanya hambatan ataupun aspek lain dapat jadi hambatan dalam kegiatan berbicara. Supaya proses penyampaian pesan dalam komunikasi pemerintahan berlangsung dengan baik perlu silih penafsiran ataupun konvensi bersama buat menggapai tujuan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata

Partisipasi bisa diucap selaku kekuatan yang dipunyai oleh warga dalam menanggulangi perkara kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Partisipasi ialah redistribusi kekuatan, yang membolehkan seluruh kalangan ekonomi serta politik buat

dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan. Cohen serta Uphoff(1979) membagi partisipasi ke sebagian tahapan, ialah perencanaan, penerapan, serta penilaian dan mengikmati..

Awal, perencanaan, keikutsertaan warga dalam rapatrapat resmi. Perencanaan bertujuan buat memandang sepanjang mana pemahaman serta pertisipasi warga dalam membagikan evaluasi serta pemilihan cocok dengan kebutuhan warga itu sendiri. Pengambilan keputusan dicoba oleh pimpinan(stakeholders) terpusat pada yang mempunyai kekuasaan.

Kedua, penerapan, ialah sesi terutama dalam penerapan program ataupun pembangunan. Sesi penerapan kerap dimaksud selaku sesi implementasi serta pelaksanaan, tidak cuma bernilai suatu aksi nyata, tetapi bisa pula secara membagikan masukan revisi program lewat sumber energi manusia serta sumberdaya alam. Sesi ini sangat berbeda dengan top down serta bottom up, tetapi partisipasi bisa berbentuk gabungan dari kedua diatas, yang bekerja tidaklah cuma pihak industri, tetapi setelah itu membangun perihal yang dibutuhkan.

Serta ketiga, penilaian, sesi ini ialah umpan balik(feedback) yang bisa berikan masukan demi revisi penerapan program ataupun aktivitas berikutnya. Sesi ini ialah keahlian warga dalam memperhitungkan baik, sukses, serta efisien ataupun tidak sesuatu program. Penilaian pada warga setingkat lebih menguasai khasiat efektifitas serta kekurangan dari sesuatu program yang diberikan sehingga warga dapat menyusun pemecahan atas program mereka.

Keempat, menikmati hasil, tahapan ini jadi penanda ataupun aspek keberhasilan partisipasi warga dalam perencanaan serta penerapan program pariwisata. Dalam memandang posisi warga selaku subjek serta objek pembangunan pariwisata, terus menjadi besar khasiat program dialami, supaya sanggup merasakan keberhasilan dari program yang dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif (mixed method) dimana data yang dikumpulkan berupa tanggapan, informasi tentang Pulau Penyengat, konsep dan informasi yang mengungkapkan permasalahan pariwisata Penyengat dalam bentuk deskriptif. Seperti yang telah disebutkan pada pendahuluan, penerapan metode campuran dalam penelitian ini menggunakan tanya jawab berupa pertanyaan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyertakan referensi data lapangan untuk menguraikan pemaparan penelitian ini. Data berasal dari naskah wawancara, kuesioner, catatan lapangan, dokumen dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian dilakukan di Pulau Penyengat Kepulauan Riau. Alasan pemilihan Pulau Penyengat sebagai objek penelitian adalah: a) potensi (alam, warisan), b) partisipasi

masyarakat, c) kebijakan/peraturan, dan d) strategi pengembangan kawasan wisata Pulau Penyengat berdasarkan kondisi objektif tersebut.

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data secara umum menggunakan metode utama yang saling berkaitan dan saling melengkapi yaitu wawancara, angket, observasi dan penelusuran literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Komunikasi Pemerintah Dalam Mendukung Pengembangan wisata Pulau Penyengat

Komunikasi pemerintah harus mampu memposisikan semua pihak sebagai partisipan urusan DPRD Tanjung Pinang atau sejajar sehingga arus informasi tidak didominasi oleh satu pihak. Komunikasi pemerintah yang partisipatif harus menopang konsensus dengan menghasilkan keputusan secara demokratis melalui proses interaktif dan transaksional yang berkelanjutan.

Komunikasi antar lembaga harus berlangsung dalam suasana dialogis, terbuka, dan bebas tekanan, dimana masing-masing pihak yang terlibat mendapatkan manfaat secara adil dan bijaksana sesuai kontribusinya. Analisis permasalahan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Penyengat Kepulauan Riau. Pemodelan frekuensi adalah langkah pertama dalam analisis, mengelompokkan responden berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya dampak pengembangan pariwisata di Pulau Penyengat dianalisis berdasarkan variabel respon dan partisipasi masyarakat.

Identifikasi Responden

Responden yang tersebar cukup merata di seluruh kelompok umur menjadi dasar untuk menganalisis respon masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor usia mempengaruhi keberlangsungan informasi sejarah Pulau Penyengat, termasuk pemahaman latar belakang sosial budaya masyarakat Pulau Penyengat. Diakui, kelangsungan informasi sejarah dari waktu ke waktu bergantung pada peninggalan informasi yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Pulau Penyengat, yang selama ini belum dihimpun secara rinci oleh pemerintah kabupaten. Program pemerintah yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya tidak akan berhasil tanpa peran aktif sebagai objek dan partisipasi dalam komunikasi pemerintah (dua subjek pengembangan pariwisata).

Tabel 1. Nama Situs Cagar Budaya dan SK Penetapan Sebagai Situs Cagar Budaya di Pulau Penyengat

No.	Nama situs	Keterangan
1.	Mesjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat	Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003
2.	Makam Engku Putri	Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004
3.	Makam Raja Haji Fisabilillah	Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004
4.	Perpustakaan Kuno Khutub Khana Yamtuan Ahmady	
5.	Bekas Gedung Engku Haji Daud (Tabib Kerajaan)	
6.	Bekas Istana Sultan Abdul Rahman Muazam Syah	
7.	Komplek Makam Raja Ja'afar	Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004
8.	Bekas Gedung Tengku Bilik	Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004
9.	Bekas Istana Raja Ali Marhum Kantor	Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004
10.	Istana Bahjah (Istana Raja Ali Kelana)	
11.	Makam Yang Dipertuan Muda ke VII	Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004
12.	Makam Embung Fatimah	
13.	Gedung Mesiu atau Gedung Obat Bedil	Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No. 9 tahun 2003
14.	Kubu (Benteng) dan Parit-Parit Pertahanan	Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004
15.	Bekas Gedung Rusydiah Klab dan Percetakan Kerajaan	
16.	Gedung Raja Haji Abdullah (Hakim Kerajaan)	
17.	Perigi Puteri (Perigi Kunci)	Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004

Tabel 2. Respon Masyarakat Terkait Manajemen Pengelola Pulau Penyengat

No	Manajemen Pengunjung	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Total (%)
1	Swadaya Masyarakat	68 (49%)	87 (51%)	155 (100%)
2	Dorongan Pemerintah	101 (70%)	54 (50%)	155 (100%)
3	Inisiatif Swasta	90 (60%)	65 (40%)	155 (100%)

Pengelolaan zona pengembangan pariwisata menjadi modal industri pariwisata. Manajemen pengunjung berkaitan dengan keakuratan arus informasi wisatawan (transportasi

dan akomodasi). Khusus dalam pengembangan kawasan wisata Pulau Penyengat, pengelolaan pengunjung tidak dilakukan oleh aktivis atau inisiatif masyarakat. Padahal, aspek pengelolaan pengunjung ini sangat penting karena memberikan kepastian harga, daya tarik wisata, dan apa saja yang didapat wisatawan saat berwisata. Masyarakat Pulau Penyengat memberikan respon positif terhadap pengelolaan pengunjung, namun dorongan lebih diberikan oleh pemerintah, yang harus mengambil tindakan untuk mengembangkan rencana pengelolaan pengunjung tersebut sehingga masyarakat dapat memiliki kewenangan untuk mengelola pengunjung.

Sistem Transportasi Komunikasi Dalam Pariwisata Pulau Penyengat

Perkembangan sektor pariwisata tidak akan berjalan baik tanpa sistem pariwisata yang terintegrasi (informasi rute dan jadwal, ICT, akses reservasi).

Keberadaan sistem pariwisata menjadi faktor acuan wisatawan yang menentukan tujuan wisatanya. Panduan perjalanan ini menjelaskan secara detail biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan wisatawan selama berwisata. Perkembangan pariwisata di Pulau Penyengat kurang baik, apalagi jika digabungkan dengan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata di Kepri, karena belum terpadunya sistem pariwisata. Menyikapi hal tersebut, banyak warga Pulau Penyengat yang menyatakan setuju untuk memulai sistem pariwisata di Pulau Penyengat.

Tabel 3. Respon Masyarakat Transportasi Wisata di Pulau Penyengat

No	Sistem Transportasi Wisata	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Total (%)
1	Informasi Rute dan Jadwal	160 (97%)	5 (3%)	155 (100%)
2	ICT	135 (87%)	22 (13%)	155 (100%)
3	Akses Reservasi Wisata	120 (83%)	27 (17%)	155 (100%)

Kurangnya sistem transportasi terpadu yang baik menyebabkan kesulitan bagi wisatawan cari tahu berapa biaya untuk melakukan tur dan Pulau Penyengat. Pariwisata DPRD Kota Tanjungpinang juga tidak menjelaskan secara rinci prosesnya. Usulan wisata ini ditujukan bagi wisatawan yang datang ke Pulau Penyengat. mendapatkan informasi yang salah. Selain itu, ada juga organisasi yang mendukung pariwisata pengembangan pariwisata di Pulau Penyengat misalnya belum dilakukan dengan menunjukkan urutan kunjungan dan perjalanan ke Pulau Penyengat

Dengan berkembangnya pariwisata di Pulau Penyengat, Tempat wisata (masjid dan makam) menjadi faktor penting dan pendorong Poin-poin penting bagi wisatawan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan dan mengunjungi kawasan tersebut Tanjungpinang.

Perkembangan pariwisata Pulau Penyengat telah hubungan lintas sektoral yang dapat membuka peluang investasi yang besar Masyarakat dan pemerintah Tanjung Pinang. Oleh

karena itu dampak ekonominya Pariwisata di Pulau Penyengat diharapkan memiliki aspek yang berbeda-beda, yakni ekonomi, sosial dan budaya. Pengaruh lain dalam bidang perekonomian datang dalam bentuk tumbuhnya industri atau usaha yang berkaitan dengan pariwisata di pulau tersebut Anak panah. Bentuk alternatif kegiatan pariwisata harus menjadi perhatian penting Pemerintah Daerah Tanjung Pinang dalam pengembangan tempat wisata, khususnya terkait dengan keanekaragaman budaya dan keunikan alam.

Berkat perkembangan pariwisata, suatu destinasi menjadi destinasi pariwisata akan memiliki keanekaragaman atau diversifikasi produk lokal yang membuka peluang kunjungan ulang kepada wisatawan yang pernah berkunjung ke daerah tersebut atau tujuan Pulau Penyengat. Pengembangan wisata lain seperti wisata atau desa wisata juga dianggap mampu meminimalkan potensi urbanisasi masyarakat dari pedesaan dikarenakan mampu menciptakan aktifitas ekonomi di wilayah pedesaan yang berbasis pada kegiatan pariwisata (ekonomi pariwisata).

Salah satu bentuk wisata alternatif di pulau penyengat yang bersentuhan langsung kepada masyarakat setempat dan dapat mengurangi kecenderungan fenomena urbanisasi desa ke kota adalah pengembangan wisata dengan segala entitas masyarakat, alam sekitar, dan budaya yang ada di dalamnya sebagai kekuatan daya tarik wisata di Pulau Penyengat. Pengembangan Pulau Pengengatat akan menjadi nilai tambah karena nyawa rakyat juga akan bermanfaat bagi pemerintah

Sektor lokal dan swasta. Partisipasi publik dan swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan pulau wisata Paket ini dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik. Berikutnya Oleh karena itu perlu dibuat wadah pengelolaan kawasan wisata Pulau Penyengat. menjamin kesinambungan mutu produk, kreasi negeri, sumber daya, kapasitas pendukung kebijakan (anggaran), peningkatan kapasitas sumber daya sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi pemandu wisata, promosi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, Bisa disimpulkan bahwa: (1) Suatu bentuk komunikasi resmi dikembangkan. Pariwisata Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang harus dikembangkan melalui partisipasi segalanya agar Pulau Sengangat menjadi destinasi wisata terbaik dalam sejarah meletakkan dasar-dasar bangsa dan negara. Hal-hal ini bisa saja terjadi dikelompokkan menjadi hak alam, hak budaya, dan hak sifat manusia (buatan manusia). (2) Ikuti negara dan Perkembangan wisata Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang dilihat dari

berbagai sudut pandang Pemahaman umum tersebut mendukung tercapainya Pulau Penyengat sebagai tempat tamasya. Partisipasi juga terlihat melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dalam praktek merancang tujuan, dan Desain program, penganggaran, dan implementasi pengembangan, dan analisis pengembangan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, Wignyo. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. ITS Press, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2015, *Kota Tanjungpinang Dalam Angka (Tanjungpinang City in Figures)*, BPS Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang
- Dewi, Made Heny Urmila. 2014. *Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Tabanan, Bali*. Unud
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan BPS Kab. Kepulauan Riau. 2002. *Statistik Pariwisata Kota Tanjungpinang*. Tanjungpinang.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Yayasan Riau Lingga. 2002. *Pendataan Benda Peninggalan Sejarah, Lembaga Adat, Kesenian Rakyat Tradisional dan Sinopsis Peninggalan Sejarah Kota Tanjungpinang*. Tanjungpinang.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. University Press: Gadjah Mada.
- Gold. S. M. (1980). *Recreation Planning and Design*. McGraw-Hill Book Co., New York. 332 p.
- Hall, Antony (dkk). 1986. *Community Partisipation, Social Development and State*. Methven & Co: London.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Marpaung dan Bahar. (2002). *Pengantar Pariwisata*. Alfabeta: Bandung
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ross, F. Glenn. 1998. *Psikologi Pariwisata*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Panuju, Panut dan Umami, 1999. *Psikologi Remaja*. PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Pendit, Nyoman.S, 2006. *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*. PT. Malta Pratindo. Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034

- Pudianti, Anna. 2012. Perpaduan Budaya Lokal dan Potensi Fisik Sebagai Daya Tarik Wisata Pedesaan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Tanudirdjo, Daud Aris. 2004. Kriteria Penetapan Benda Cagar Budaya. Makalah dalam Rapat Penyusunan Pedoman Penetapan Benda Cagar Budaya. Cirebon 16 Juni 2004.
- Tikson, 2001. Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Perkotaan. Makalah PPS Unhas. Unhas, Makassar
- Wardani, Ratika Yana, 2013. Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Tanjungpinang (Studi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang). Jurnal-umrah.ac.id
- Harto, Syafri. 2018. Ecotourisme dan Haritage Tourisme. Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Lingkungan dan Pariwisata Pusaka. Pekanbaru.